

PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON

Hilal Ramdhani

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

E-mail: hilal.ramdhani18@gmail.com

ABSTRAK

Pemekaran daerah Provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan Provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada Partai-Partai Politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk Provinsi Cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari Provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran Provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada Partai-Partai Politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran Provinsi Cirebon tidak berhasil.

Kata Kunci: *Elit Politik Lokal, Lobi Politik, Pemekaran Daerah, Cirebon.*

PENDAHULUAN

Wilayah Karesidenan Cirebon meliputi Indramayu, Gebang, Daerah Kasultanan Cirebon, yang meliputi daerah-daerah yang kemudian menjadi wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta tanah partikelir di Kandanghaur dan Indramayu, dan daerah Cirebon-Priangan, yang meliputi Galuh, Limbangan dan

Sukapura. Pada tahun 1870-1900an wilayah Karesidenan Cirebon terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu (Breman, 1986).

Pada masa kemerdekaan wilayah eks Karesidenan Cirebon terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cirebon yang beribu kota di Kecamatan Sumber,

Kabupaten Kuningan yang beribu kota di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Majalengka yang beribu kota di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Indramayu yang beribu kota di Kecamatan Indramayu, dan Kota Cirebon.

78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menjelaskan bahwa Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tabel 1.
Daftar Provinsi Hasil Pemekaran Daerah
dari Tahun 1999 sampai 2019

Provinsi	Ibu Kota	Waktu Peresmian
Maluku	Sofifi-Ternate	4 Oktober 1999
Banten	Serang	17 Oktober 2000
Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	4 Desember 2000
Gorontalo	Gorontalo	22 Desember 2000
Irian Jaya Barat	Manokwari	21 November 2001
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	25 Oktober 2002
Sulawesi Barat	Mamuju	5 Oktober 2004
Kalimantan Utara	Tanjung Selor	25 Oktober 2012

Sumber: Ramdhani, 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sudah ada delapan provinsi baru di Indonesia setelah reformasi. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota.

Dalam kasus proses pemekaran provinsi Cirebon dimulai pada tahun 2009 sampai 2019, tepatnya ketika pembentukan provinsi Cirebon dideklarasikan. Sejumlah perwakilan dewan yang datang menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan Provinsi Cirebon. Deklarasi dilakukan oleh Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) di sebuah ballroom

hotel di kawasan Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon. Terlihat sekitar 1.000 orang dan seluruh Panitia Pendukung Pembentukan Provinsi Cirebon (P4C) hadir. Juga terlihat perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten Cirebon, Tasiya Soemadi Al Gotas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Kota Cirebon Edi Suripno, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Majalengka M Iqbal, dan Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten Indramayu, Hasim Junaidi. Satu-satunya perwakilan anggota dewan daerah yang tidak hadir di wilayah Cirebon adalah dari Kabupaten Kuningan (Tempo, 2009). Hal tersebut menandakan bahwa adanya keseriusan dari elit politik lokal di wilayah

karesidenan Cirebon untuk membuat provinsi Cirebon. Akan tetapi dari tahun 2009-2019 deklarasi tersebut belum menghasilkan provinsi Cirebon sebagai tujuan utama. Kondisi tersebut berbeda dengan penelitian Rohmah (2018) di Banten maupun Kimura (2010) di Gorontalo melalui proses *bottom up*.

Fokus peran dalam penelitian ini ialah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan elit politik dalam melakukan tindakan lobi yang dilakukan P3C dalam membentuk Provinsi Cirebon. Peran anggota P3C dalam mengupayakan pemekaran

provinsi Cirebon, sampai saat ini belum mampu mewujudkan koalisi di tingkat karena P3C belum mampu mengajak Kabupaten Majalengka dan Kuningan untuk bergabung dalam koalisi membentuk Provinsi Cirebon. P3C sampai tahun 2019 hanya mampu mengajak Kabupaten Indramayu serta Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon membentuk Provinsi Cirebon. Dalam kondisi politik seperti itu, tidak bisa membentuk sebuah provinsi baru, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 minimal harus ada lima kabupaten dan atau kota.

KAJIAN PUSTAKA

Kimura (2010) menyatakan elit lokal pada dasarnya mengkooptasi reformasi kelembagaan baru untuk keuntungan mereka sendiri di tingkat lokal. Perjuangan teritorial baru melampaui kontestasi elit lokal dan perjuangan 'horisontal' untuk mendapatkan kekuasaan di Indonesia yang terdesentralisasi. Mereka juga menunjukkan hubungan atau aliansi 'vertikal' baru yang menjangkau tingkat lokal, regional dan nasional. Kasus-kasus komparatif menyoroiti kerja dalam aliansi-aliansi ini di berbagai konteks historis dan regional.

Proliferasi regional, bukanlah produk dari satu kelompok aktor tunggal, tetapi lebih merupakan upaya kolaborasi antara individu dan kelompok pada tingkat teritorial yang beragam. Dengan kata lain, ada politik koalisi yang sedang terjadi. Ini sangat

kontras dengan cara berpikir tentang gerakan teritorial. Biasanya, menganggap gerakan ini sebagai konflik, berusaha melepaskan diri atau mendapatkan lebih banyak otonomi dari negara pusat. Dalam konteks proliferasi provinsi, Kimura (2010) berpendapat bahwa gerakan-gerakan regional bukanlah separatis, melainkan 'integrasionis' artinya, merefleksikan negara-bangsa Indonesia yang lebih besar daripada tantangan yang menghambatnya.

Proliferasi provinsi menunjukkan apa yang disebut politik perbedaan (Buehler, 2014). Nilai-nilai simultan dan berbeda dapat membentuk dasar untuk koalisi. Dengan kata lain, koalisi dapat bekerja karena perbedaan, bukan hanya mengesampingkannya. Ini khususnya terjadi ketika kita berpikir tentang gerakan teritorial atau regional. Cenderung ada asumsi bahwa politik

teritorial secara inheren adalah permainan zero-sum dan bahwa manfaat teritorial nasional datang dengan mengorbankan wilayah lokal atau regional (Camagni, 2002).

Kasus provinsi Gorontalo yang memisahkan diri dari Sulawesi Utara menggambarkan model pembentukan provinsi baru dari bawah ke atas. Pemicu gerakan provinsi baru muncul dari perasaan luas tentang marginalitas historis yang berdasarkan garis etnis dan agama. Ketika desentralisasi dan demokratisasi muncul di tingkat nasional, mereka menciptakan kondisi yang matang di Gorontalo bagi orang-orang untuk mulai mengadvokasi provinsi baru. Kasus ini juga menunjukkan cara di mana aktor nasional dan provinsi ditingkatkan ke atas untuk bergabung bersama dengan aktor lokal untuk mendorong provinsi baru ke depan (Kimura, 2010).

Agar aspirasi lokal berhasil, aktor lokal juga perlu terhubung dengan sekutu tingkat nasional (Mac Ginty & Richmond, 2013). Di tingkat nasional, dua jenis aktor berkontribusi terhadap kesuksesan Gorontalo. Elite politik individu dengan akar di wilayah tersebut menawarkan dukungan simbolis dan material yang kuat. Misalnya, Presiden Habibie saat itu memberikan dukungan finansial dan lobi politik untuk tujuan tersebut. Yang lainnya termasuk elit bisnis dan militer yang tinggal di Jakarta dan memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat, seperti Rachmad Gobel, seorang pengusaha terkemuka, dan Jenderal

Wiranto, seorang jenderal terkemuka di bawah rezim Suharto.

Tetapi selain dari elit individu, partai politik juga memainkan peran penting. Secara kelembagaan, Golkar masih merupakan partai politik terkuat di tingkat nasional pada tahun 1999, dan Gorontalo - di antara wilayah lain di pulau-pulau terluar adalah basis bagi Golkar. Di tingkat provinsi, dari 25 anggota, 13 berasal dari GOLKAR, dua dari PAN, satu dari PDI-P, satu dari Kebangkitan Bangsa, satu dari Partai Bulan Bintang, empat dari PPP dan tiga dari TNI / Polri. Selain itu, karena banyak yang melihat Presiden Habibie sebagai orang Gorontalo yang telah menjadi presiden, banyak orang mendukung partai Golkar dalam pemilihan. Ini menunjukkan bahwa partai nasional yang kuat yang ingin mempertahankan dominasi legislatifnya akan memiliki insentif yang kuat untuk mengukir provinsi yang jelas akan memberikan keuntungan pemilu di tingkat nasional (Kimura, 2010).

Perilaku elit politik lokal dalam proses pemekaran daerah nampaknya sesuai dengan keinginan masyarakat, penelitian Ramdhani (2019) di Cirebon menunjukkan bahwa penolakan elit lokal Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan memiliki kesamaan dengan pandangan masyarakat yang juga menolak untuk bergabung menjadi bagian dari provinsi Cirebon. Alasan yang mendasari penolakan tersebut yaitu karena pembangunan ekonomi dan etnisitas,

dimana Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan merupakan etnis Sunda, sedangkan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu merupakan etnis Jawa. Kondisi persamaan pandangan antara masyarakat dan elit juga dipengaruhi oleh keadaan masyarakat di Jawa Barat yang patriarki dan parokial (Ramdhani, 2018).

Penelitian Qodi (2012) menunjukkan masalah politik yang muncul di daerah pemekaran seperti Maluku Utara yang merupakan wilayah pemekaran sejak tahun 1999 yang lalu dan sampai 2012 terdapat wilayah yang tidak kunjung selesai karena pemekaran tersebut. Persoalan pemekaran wilayah kemudian terus ramai menjadi konsumsi politik ketika menghadapi PEMILUKADA (Pemilu Bupati maupun Kota) juga Pemilu Legislatif demikian ramai diperebutkan oleh masing-masing kandidat dengan latar belakang etnis dan agama yang terdapat di Maluku Utara.

Rohmah (2018) menunjukkan hasil bahwa konflik antara elit Banten dengan Elit Jawa Barat dalam proses pembentukan provinsi Banten yaitu konflik antar elit dalam proses pembentukan provinsi Banten dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar, yakni elit Banten dan elit Jawa Barat. Keduanya, sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam mempertahankan kepentingannya dalam pembentukan provinsi Banten. Alasan yang digunakan keduanya adalah karena adanya faktor sejarah, etnik, ekonomi,

dan tentu saja politik. Perdebatan mengenai RUU Pembentukan Provinsi Banten telah disetujui oleh semua fraksi di DPR (Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Reformasi, Fraksi PBB, Fraksi PDU, Fraksi TNI/POLRI, Fraksi KKI dan Fraksi PDKB), tetapi dinamika yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi di DPR.

Febriyandi (2015) yang melakukan penelitian di Pulau Sebatik, yang menunjukkan bahwa pemekaran ialah sebuah kebutuhan masyarakat, bukanlah sebuah keinginan. Jika kita geser proses politiknya ini akan menjadi sebuah 'kebutuhan' maka 'turunannya' akan berbeda pula, seperti kebutuhan untuk 'mendekatkan' wakil pusat di daerah melalui kepala daerah agar setiap kebutuhan dan keluhan masyarakat terlihat lebih jelas. Kedua, dengan adanya wakil pusat di daerah lebih dekat pemerintah dapat fokus memperhatikan dan menjaga wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Pemekaran daerah tidak berimplikasi pada perbaikan daerah, sebagaimana penelitian Sjaf (2014) menunjukkan hasil bahwa dinamika pemekaran daerah di Indonesia menunjukkan gejala yang negatif, politik dari masa ke masa yang menunjukkan adanya gejala negatif dari suatu pemekaran daerah. Semakin bertambahnya jumlah wilayah hasil pemekaran daerah tidak serta merta membuat suatu perubahan besar bagi

kesejahteraan dan kemudahan akses politik warga negara.

Permasalahan yang terjadi pada pemekaran daerah merupakan suatu dinamika kebangsaan yang wajar dan hal itu menunjukkan adanya perbaikan daripada sistem di masa orde baru. Muqoyyidin (2013) pemekaran pasca reformasi memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman, dan otonomi lokal, sesuatu yang dulu diabaikan pada era Orde Baru. Namun di lain pihak,

fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus membawa masalah-masalah baru. Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat politis-sosiologis, bahan pustaka yang bersifat jurnal merupakan sumber data primer, karena bersifat ilmiah dan memiliki keakuratan data yang memadai, sedangkan untuk data sekunder menggunakan data berupa pemberitaan media-media online terkait dengan peran Presidium Pembentukan Provinsi

Cirebon dalam upaya membentuk provinsi Cirebon, data kemudian di analisis menggunakan teori dari Kimura dan diperoleh suatu kesimpulan. Karena sifat dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, maka metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian politis-sosiologis ini (Ramdhani, 2019).

Tabel 2.

Data Primer dan Data Sekunder

Data Primer	Data Sekunder
Jurnal Buehler (2014)	Media Online DetikNews (2008)
Jurnal Camagni (2002)	Media Online Kaskus.com (2012)
Jurnal Febriyandi (2015)	Media Online news.okezone.com (2012)
Jurnal Kimura (2010)	Media Online republika.co.id (2010)
Jurnal Mac Ginty & Richmond (2013)	Media Online Tempo (2009)
Jurnal Muqoyyidin (2013)	Media Online cirebonplus.com (2018)
Jurnal Qodi (2012)	
Jurnal Ramdhani (2019)	
Jurnal Rohmah (2018)	
Buku Sjaf (2014)	

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan yang merupakan untuk melihat dampak yang

disebabkan aturan hukum tersebut terutama yang menyangkut harus adanya lima Kabupaten dan/atau Kota untuk membentuk provinsi baru dan

pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu politik. Peneliti ditunjukkan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan teori baru dalam memahami kegagalan pembentukan provinsi baru di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis elit politik berdasarkan teori

Kimura (2010), dianalisis menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dalam melakukan lobi politik yang mengakibatkan kegagalan pembentukan provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lobi yang dilakukan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) untuk melakukan pemekaran daerah Provinsi Cirebon sudah dilakukan baik di tingkat Kabupaten dan/atau Kota, Provinsi bahkan nasional. Proses yang dilakukan masih belum menemukan kesepakatan selama tahun 2009-2019.

1. Lobi di Tingkat Kabupaten dan/atau Kota

Kegagalan lobi terjadi di Kabupaten Majalengka, Sutrisno sebagai Bupati Majalengka dua periode yakni 2008-2013 dan 2013-2018 mengingatkan agar para penggagas tidak mengait-ngaitkan Provinsi Cirebon dengan Kabupaten Majalengka. Sutrisno menegaskan, Kabupaten Majalengka akan tetap menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sutrisno menyarankan untuk melakukan pemekaran Kabupaten terlebih dahulu, jika jumlah kabupaten yang mendukung pembentukan Provinsi Cirebon dianggap tidak memenuhi syarat. Adanya sejarah Kabupaten Majalengka yang masuk ke dalam kekuasaan Sunan Gunung Djati,

tidak bisa menjadi alasan para penggagas provinsi Cirebon untuk mencatumkan Kabupaten Majalengka ke dalam rencana itu (Nastain, 2012).

Penolakan yang dilakukan Bupati Majalengka terkait pemekaran Provinsi Cirebon, selaras dengan ribuan warga Kabupaten Majalengka, untuk menolak pembentukan provinsi Cirebon karena dianggap akan menghancurkan pembangunan di Majalengka yang selama ini semakin berkembang (Ruslan, 2012).

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda menolak adanya pemekaran Provinsi Cirebon karena fokus pada pembangunan di Kabupaten Kuningan, apabila ada pemekaran Provinsi Cirebon, hal tersebut akan mengganggu dan akan mengakibatkan terjadinya gejolak di masyarakat. Selain itu, Aang Hamid Suganda mengkritisi Tim P3C (Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon) yang terlalu tergesa-gesa dalam mewanacitakan Provinsi Cirebon. Selain itu, masyarakat Kuningan menolak untuk bergabung ke Provinsi Cirebon karena lebih merasa dekat secara etnisitas dengan Jawa Barat

yang merupakan etnis Sunda (Ibrani, 2012).

Pandangan yang berbeda terkait dengan pemerakan Provinsi Cirebon terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Terdapat kongres yang digelar masyarakat Pantura karena merasa dianaktirikan oleh Pemda Jawa Barat. Segala kebijakan yang menyangkut pembangunan dinilai belum menyentuh daerah Pantura, seperti Cirebon, Indramayu, bahkan Subang dan Karawang. Dalam kesepakatannya, warga Indramayu menuntut pembentukan Provinsi Cirebon. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Hasyim Junaedi berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indramayu (DetikNews, 2008).

Sesuai dengan pandangan elit politik, masyarakat di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon menginginkan adanya pemekaran provinsi Cirebon. Roni Rustandi, perwakilan mahasiswa mengungkapkan jika pendapatan sejumlah kabupaten di wilayah Cirebon sudah lebih dari Rp 3 triliun. Namun yang kembali ke wilayah Cirebon untuk pembangunan justru hanya Rp 1 triliun. Amri mengatakan, Cirebon setiap tahunnya selalu mengalami gagal panen. Penyebabnya tidak lain karena hingga kini waduk Jatigede yang dijanjikan tidak berdampak pada kebutuhan petani. Perwakilan seniman Cirebon, Rucita Dewa, mengungkapkan jika

Provinsi Jabar hanya menganaktirikan Cirebon. Jika ada pagelaran seni di luar negeri, yang diberikan hanya seniman di Bandung. Seniman di wilayah Cirebon belum pernah mendapatkan tawaran untuk panggung di luar negeri. Kondisi ini seringkali menyebabkan kecemburuan seniman Cirebon dengan seniman yang ada di Bandung, padahal potensi seni di wilayah Cirebon sangat banyak, tapi diabaikan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa keinginan masyarakat di wilayah Cirebon karena kekecewaan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Cirebon (Tempo, 2009).

Adanya penolakan dari Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan untuk bergabung kedalam Provinsi Cirebon menandakan adanya peran elit politik yang mengakibatkan tidak bisa terwujudnya provinsi Cirebon, hal itu memicu suatu gagasan baru untuk melakukan pemekaran dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur (Ramdhani, 2019). Hal ini dimaksudkan untuk membentuk provinsi Cirebon tanpa harus memasukkan Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan ke dalam wilayah Provinsi Cirebon.

2. Lobi di Tingkat Provinsi

Peran P3C dalam mewujudkan Provinsi Cirebon dilakukan pada tingkat Provinsi, lobi yang dilakukan P3C nampaknya belum menghasilkan persetujuan di tingkat Provinsi. Ahmad Heriyawan sebagai Gubernur 2 periode (2008-2013 dan 2013-2018)

berpendapat bahwa tidak mempermasalahkan pemekaran Provinsi Cirebon, akan tetapi permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten dan atau Kota. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara kurang sepakat dengan adanya pemekaran Provinsi Cirebon, karena pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat akan kehilangan 70 persen (Purwoko, 2010). Terkait dengan sikap Ahmad Heryawan, Nana Sudiana selaku ketua P3C merasa kecewa, karena pada saat kampanye Ahmad Heryawan memberikan janji akan memfasilitasi pemekaran Provinsi Cirebon walaupun hanya ada 3 Kabupaten atau Kota yang menyetujui untuk bergabung.

Upaya untuk mewujudkan Provinsi Cirebon, P3C tidak hanya selesai pada periode Ahmad Heryawan, akan tetapi berlanjut pada periode Ridwan Kamil, akan tetapi beliau mengaku tidak sepakat dengan adanya pemekaran Provinsi di wilayah Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai pemekaran wilayah tingkat dua lebih penting ketimbang membentuk provinsi baru, karena aksi pelayanan publik itu bukan di Provinsi tapi di Kabupaten atau Kota. Ridwan Kamil lebih cenderung mendukung pemekaran wilayah kabupaten kota. Seperti halnya Pemprov Jabar mengajukan pemekaran wilayah Sukabumi Selatan dan Garut Selatan ke pemerintah pusat (Abdussalam, 2019).

3. Lobi ke Tingkat Nasional dan Partai Politik

Pada tingkat pusat, P3C sudah memasukan usulan 314 DOB dan terkait dengan Provinsi itu antara lain Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Sukabumi dan Provinsi Cirebon. Namun, Kemendagri akan membuat pengecualian terkait putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan dua provinsi di Papua. Kemendagri ingin lebih berkonsentrasi mengoptimalkan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang sudah ada. Pasalnya, menurut evaluasi Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri, dari 514 kabupaten/kota mulai 1999 sampai 2019, yang memenuhi syarat sukses tidak lebih 23 persen (Hafizhah, 2019).

Terkait dengan usulan P3C ke DPR RI, sudah disampaikan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sejak tahun 2015, begitu juga Rokhmin Dahuri ketua DPP PDI Perjuangan bidang Maritim menyatakan peningkatan populasi penduduk dan bonus demografi ke depan, aspirasi daerah Ciayumajakuning menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Jawa Barat nampaknya suatu realita yang perlu dipertimbangkan oleh penentu kebijakan di pemerintah pusat dan juga didukung oleh para wakil rakyat di DPR, akan tetapi respon dari Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Cirebon-

Indramayu, H Ono Surono hanya memberikan persetujuan untuk pemekaran Indramayu Barat (Sadewo, 2018).

4. Analisis Teoritis

Berdasarkan kasus pemekaran provinsi Cirebon, P3C memiliki peran penting dalam proses mewujudkan Provinsi Cirebon, akan tetapi semenjak tahun 2009-2019 masih belum terealisasikan. Teori elit dalam proses pemekaran daerah, disampaikan oleh Kimura (2010) bahwa kasus pemekaran provinsi menunjukkan apa yang disebut politik perbedaan. Nilai-nilai simultan dan berbeda dapat membentuk dasar untuk koalisi. Dengan kata lain, koalisi dapat bekerja karena perbedaan, bukan hanya mengesampingkannya. Ini khususnya terjadi ketika kita berpikir tentang gerakan teritorial atau regional. Cenderung ada asumsi bahwa politik teritorial secara inheren adalah permainan *zero-sum* dan bahwa manfaat teritorial nasional datang dengan mengorbankan wilayah lokal atau regional. Merujuk pada teori Kimura belum adanya koalisi yang solid ditingkat lokal untuk melakukan pemekaran ke tingkat pusat mengakibatkan belum terealiasikannya Provinsi Cirebon.

KESIMPULAN

Lobi yang dilakukan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) belum optimal dalam membentuk koalisi ditingkat lokal (Kabupaten dan/atau Kota serta Provinsi Jawa

Kimura (2010) menyatakan bahwa dalam pemekaran daerah *bottom-up* elit politik yang berkoalisi terbagi menjadi kelompok intelektual, kelompok budaya, tokoh agama dan pebisnis. Elit politik lokal yang sudah berkoalisi perlu untuk memiliki hubungan dengan elit politik nasional, dalam kasus Gorontalo adanya dukungan dari Habibie, Rahmat Gobel dan Wiranto. Bukan hanya melakukan lobi antar individu, elit politik lokal yang berkoalisi perlu untuk melobi partai politik yang ada di daerah maupun di pusat untuk menyetujui pemekaran daerah.

Berdasarkan tersebut nampaknya P3C belum melakukan lobi kepada elit di tingkat nasional, belum juga adanya pendekatan kepada partai-partai politik terutama yang berkuasa di tingkat lokal maupun nasional, serta belum ada soliditas dari koalisi di tingkat lokal yang seharusnya diwakili oleh lima Kabupaten atau Kota. Penelitian ini akan fokus pada peran P3C dalam melakukan lobi kepada elit politik nasional, elit politik lokal di wilayah ciayumajakuning dan partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal maupun nasional sebagai upaya mewujudkan pemekaran daerah provinsi Cirebon.

Barat), koalisi di tingkat pusat, serta belum optimal dalam melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional mengakibatkan kegagalan pembentukan provinsi Cirebon. Hasil

penelitian ini menjadi pembeda dari teori Kimura yang menunjukkan adanya keberhasilan pemekaran

provinsi dengan sistem *bottom-up* seperti yang terjadi di Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, S. (2019). *Ridwan Kamil Tak Setuju Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Lebih Setuju Pemekaran Kabupaten/Kota*. [online] diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2019/08/12/ridwan-kamil-tak-setuju-pembentukan-provinsi-bogor-raya-lebih-setuju-pemekaran-kabupatenkota>.
- Breman, J. (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Bugin, B. (2007). Penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan, publik dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Buehler, M. (2014). *Political Change and Territoriality in Indonesia: Provincial Proliferation by Ehito Kimura*. *Indonesia*, 97(1), 137-139.
- Camagni, R. (2002). *On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?*. *Urban studies*, 39(13), 2395-2411.
- DetikNews. (2008). *8.000 Orang Berkongres Tuntut Pembentukan Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/890024/8000-orang-berkongres-tuntut-pembentukan-provinsi-cirebon>.
- Febriyandi, D. (2015). *Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)*. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 3(2).
- Ibranif. (2012). *Warga Kuningan Menolak Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://www.kaskus.co.id/thread/50a3aff8562acf3418000084/warga-kuningan-jabar-masuk-sini/>
- Kimura, E. (2010). *Proliferating provinces: territorial politics in post-Suharto Indonesia*. *South East Asia Research*, 18(3), hlm. 415-449.
- Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). *The local turn in peace building: A critical agenda for peace*. *Third world quarterly*, 34(5), 763-783.

- Muqoyyidin, A. W. (2013). *Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287-310.
- Nastain, I. (2012). *Majalengka Ogah Ikut Wacana Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2012/01/28/340/565334/majalengkaogah-ikut-wacana-provinsi-cirebon>
- Purwoko, K. (2010). *Gubernur Jabar tak Permasalahakan Pembentukan Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/09/29/137035-gubernur-jabar-tak-permasalahakan-pembentukan-provinsi-cirebon>.
- Qodi, Z. (2012). *Involusi Politik Pemekaran, Etnisitas, Dan Agama: Tantangan Reformasi Birokrasi Kasus Maluku Utara*. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(4), 217-226.
- Ramdhani, H. (2018). *Reorientasi Politik Gender dalam Sistem Masyarakat Patriarkis*. *Law Research Review Quarterly*, 4(03), 621-628. <https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27034>
- Ramdhani, H. (2019). *Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah*. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 219-226.
- Ramdhani, H. (2019). *Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi Negeri*. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Rohmah, N. S. (2018). *Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten*. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 90-105.
- Ruslan. H. (2012). *Warga Majalengka Tolak Pembentukan Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/regional/jawa-barat/12/01/24/lyb0xw-warga-majalengka-tolak-pembentukan-provinsi-cirebon>
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Tempo. (2009). *Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Deklarasikan Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/163726/presidium-pembentukan-provinsicirebon-deklarasikan-provinsi-cirebon>
- Tempo. Co. (2009). *Jawa Barat Didesak Setujui Pembentukan Provinsi Cirebon*. [online]. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/205220/jawa-barat-didesak-setujui-pembentukan-provinsi-cirebon/full&view=ok>
- Hafizhah, H. (2019). *Mendagri Tolak Pemekaran 314 Daerah*. [online]. Diakses dari <https://nasional.republika.co.id>
- /berita/pzg3e7415/mendagri-tolak-pemekaran-314-daerah
- Sadewo, K. (2018). *Satu Langkah Menuju Pemekaran Cirebon Timur dan Indramayu Barat?*. [online]. Diakses dari <http://cirebonplus.com/berita/bersiap-menyambut-pemekaran-cirebon-timur-dan-indramayu-barat/>